RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2018 - 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON
2019

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2028 – 2023 tahun dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 yakni dengan visi Wali Kota terpilih adalah “SEHATI kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif)”

Cirebon, Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

IDIG DAIMAN, S.Ip, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680822 199703 1 003

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
BAB I		PENDAHULUAN.....	1
	1.1	Latar Belakang.....	1
	1.2	Landasan Hukum.....	3
	1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN.....	1
	2.1	Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	2.2	Sumber Daya Manusia.....	22
	2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.....	31
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	37
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	1
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	3
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	5
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	8
	3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis.....	8
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN	1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD....	1

BAB V STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 1

BAB VI I KINERJA PENYELENGGARAAN 1

BAB VI II PENUTUP 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah identik dengan rencana strategis *(strategic planning).*

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak

mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungan kekuatan *(strenghts),* kelemahan *(weakness*), peluang *(opportunities*), dan tantangan *(threats)* yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Stategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Renstra DKIS disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun, yaitu kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023 yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Renstra Perangkat Daerah menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui proses penyusunan rencana yang benar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra DKIS Kota Cirebon 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
27. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2018-2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DKIS Tahun 2018-2023 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

I. Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon disingkat DKIS Kota Cirebon, DKIS Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi informatika dan statistik.

II. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang komunikasi informatika dan statistik;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang komunikasi informatika dan statistik;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi informatika dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang komunikasi informatika dan statistik;

III. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
2) unsur staf adalah Sekretaris;
3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
6) UPT; dan
7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, terdiri dari:
   1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
   3. Seksi Layanan Informasi Publik.

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari :
   1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   2. Seksi Hubungan Media; dan
   3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
   1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
   2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
   3. Seksi Keamanan Informasi *E-Government*.

f. Bidang Layanan *E-Government*, terdiri dari :
   1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
   2. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
   3. Seksi Tata Kelola *E-Government*.

g. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, terdiri dari:
   1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
   2. Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral; dan
   3. Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian.

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas Unsur Organisasi

A. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2. Fungsi
   a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
   b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
   f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
   h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

1. Tugas Pokok

   Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan,kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

2. Fungsi
   a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
   b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
   c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;

e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan sub bagian keuangan;

g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidangnya.

3. Sekretariat membawakan :

a. Sub Bagian Umum

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.

(2) Fungsi

a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;

d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;

e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;

f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas lingkup Sub Bagian Umum;
h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Fungsi

a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Dinas;
c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
e. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

(2) Fungsi

a. Fungsipenelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Dinas;
d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

1. Tugas Pokok

Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas pengelolaan informasi publik.

2. Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik; dan
i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahkan;

a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;

1. Tugas Pokok

Seksi Pengelolaan Opini Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan opini publik.

2. Fungsi
   a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
   f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Opini Publik;
   g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
   h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Tugas Pokok
   1. Tugas Pokok

      Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik.
   2. Fungsi
      a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatanDinas lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
      b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
      c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
      d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Layanan Informasi Publik

1. Tugas Pokok

Seksi Layanan Informasi Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan layanan informasi publik.

2. Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Layanan Informasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Layanan Informasi Publik;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Layanan Informasi Publik;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Layanan Informasi Publik;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Layanan Informasi Publik; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

1. Tugas Pokok

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pengelolaan komunikasi publik.

2. Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :

(1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Tugas Pokok

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam

memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan media komunikasi publik.

3. Fungsi
   a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
   f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
   g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
   h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Seksi Hubungan Media

1. Tugas Pokok

   Seksi Hubungan Media sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas dalam rangka pengelolaan hubungan media.

2. Fungsi
   a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Hubungan Media;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Hubungan Media;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Media;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Media;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Hubungan Media;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Hubungan Media; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik

1. Tugas Pokok

Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendayagunaan sumber daya komunikasi publik.

2. Fungsi

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Tugas Pokok

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksnakan tugas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

2. Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
   a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
      (1) Tugas Pokok

      Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi.

      (2) Fungsi
         a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan bidang, lingkup seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
         b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang, lingkup seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
         c. Pelaksanaan tugas pokok seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
         d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
         e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
         f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
         g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang, lingkup seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
         h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
   b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Tugas Pokok
      (1) Tugas Pokok

      Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Keamanan Informasi E-Government

(1) Tugas Pokok

Seksi Keamanan Informasi E-Government sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan informasi E-Government.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Informasi E- Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Keamanan Informasi E- Government;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Keamanan Informasi E- Government;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Informasi E-Government;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Informasi E-Government;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Keamanan Informasi E-Government;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Keamanan Informasi E-Government; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

F. Bidang Layanan E-Government

2. Tugas Pokok

Bidang Layanan E-Government sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang layanan E-Government.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Layanan E-Government;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Layanan E-Government;
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang E-Governmen;
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang E-Government;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan E-Government;
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan E-Government;
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Layanan E-Government; dan
i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Layanan E-Government, membawahkan:
   a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
      (1) Tugas Pokok

      Seksi Pengembangan Aplikasi sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengembangan aplikasi E-Government.

      (2) Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

      a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Aplikasi;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Aplikasi;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Aplikasi;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengembangan Ekosistem E-Government.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Kelola E-Government

(1) Tugas Pokok

Seksi Tata Kelola E-Government sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas tata kelola E- Government.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatanDinas lingkup Seksi Tata Kelola E-Government;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Tata Kelola E-Government;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Tata Kelola E-Government;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi TataKelola E-Government;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Tata Kelola E-Government;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Tata Kelola E-Government; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

G. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian

1. Tugas Pokok

Bidang Statistik Sektoral dan Persandian sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral dan persandian.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik Sektoral dan Persandian mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan;
d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian; dan

i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, membawahkan:

a. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;

(1) Tugas Pokok

Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendataan dan pengolahan data statistik sektoral.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral

(1) Tugas Pokok

Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas analisis dan kemitraan statistik sektoral.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian

(1) Tugas Pokok

Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas tata kelola E-Government.

(2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian;
c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian;
e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian; dan
h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON KOTA CIREBON TAHUN 2018

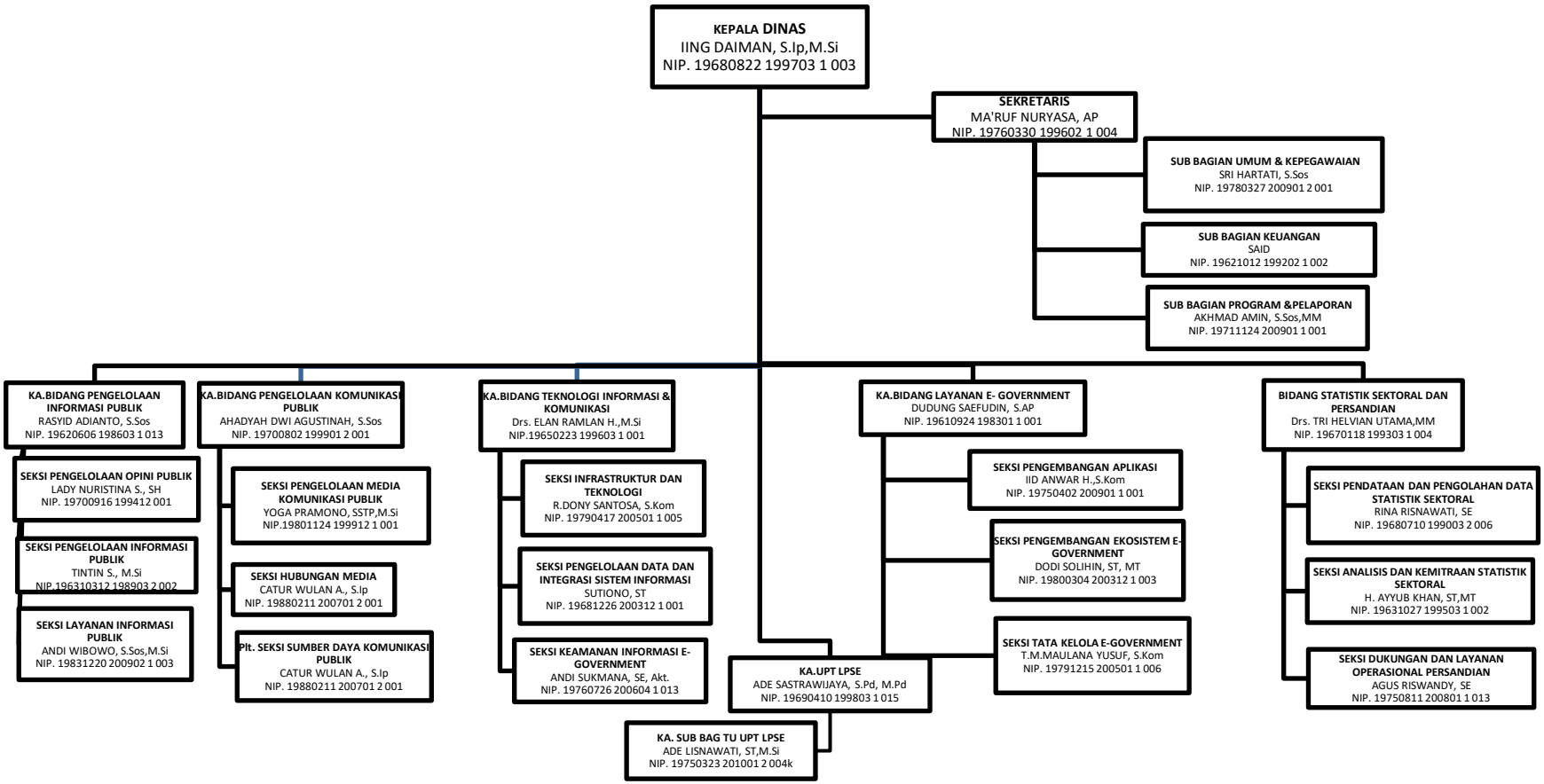

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi Informatika dan StatistikKota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon terdiri dari:

Tabel II.1

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	5	25	8	38
2	Perempuan	-	-	11	1	12
JUMLAH TOTAL						**50**

Sumber : DKIS Kota Cirebon, Agustus 2018

Tabel II.2

Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	LAKI-LAKI	-	-	6	2	18	12	38
2	PEREMPUAN	-	-	-	-	9	3	12
JUMLAH TOTAL								**50**

Sumber : DKIS Kota Cirebon, Agustus 2018

Tabel II.3

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	4	1	5
4	Eselon IV/a	13	5	18
5	Eselon IV/b	-	1	1
JUMLAH TOTAL				**26**

Sumber : DKIS Kota Cirebon, Agustus 2018

Dari total keseluruhan 50 orang personil Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Non PNS 37 orang yang tersebar dibeberapa bidang.

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Daftar Inventaris Barang Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	2 Unit
2	Tanah Urugan (Aset Rehabilitasi)	1 Unit
3	Bangunan Gedung yang dipakai	2 Unit
4	Bangunan Gedung yang tidak dipakai (Ex SD kampung Melati)	1 Unit
5	Bangunan Gedung (Aset Rehabilitasi)	5 Unit
6	Ruang Kerja	29 Unit
7	Ruang Rapat	3 Unit

No	Uraian	Jumlah
8	Kendaraan Roda 4	9 Unit
9	Kendaraan Roda 2	14 Unit
10	PC Komputer	54 Unit
11	Laptop	15 Unit
12	Notebook	5 Unit
13	Printer	20 Unit
14	Server	18 Unit
15	Wireless Accespoint	10 Unit
16	Wireless (Crimping Tool Ori)	3 Unit
17	Wireless (Radio Wireles outdor client)	4 Unit
18	Wireless (Antena Grid 2,7 Ghz)	7 Unit
19	Wireless (Antena Grid 2,4 Ghz)	5 Unit
20	Wireless (Mini PCL)	4 Unit
21	Router	31 Unit
22	Switch Hub	9 Unit
23	AC Split	44 Unit
24	Telephone PABX	3 Unit
25	Handy Talky	4 Unit
26	Pesawat Telephone	27 Unit
27	Facsimile	2 Unit
28	Self Supporting Tower	3 Unit
29	Gury Tower	47 Unit
30	Concrete Tower	1 Unit
31	Tripod Camera	3 Unit
32	Camera Digital	3 Unit
33	Camera Drone	1 Unit
34	Proyektor+Attachment	2 Unit
35	Layar Proyektor	2 Unit
36	Jaringan Fiber Optik	3 Unit

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun

demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik

a. Asset Tetap

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Asset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota seperti tabel di bawah ini Cirebon

Tabel II. 5

Daftar Asset
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PERIODE : 01 JANUARI 2018 – 28 AGUSTUS 2018

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	*2*	*3*
A	**ASET TETAP**	
1	Tanah	3.457.574.000
2	Peralatan dan Mesin	8.395.371.246
3	Gedung dan Bangunan	2.910.891.900
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	278.124.205
5	Aset Tetap Lainnya	-

6	Kontruksi dalam pengerjaan	48.500.000
	Jumlah Aset Tetap :	**15.090.461.351**
B	**ASET LAINNYA**	
1	Aset Tak Berwujud	41.195.000
2	Aset Rusak Berat	37.475.000
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-
	Jumlah Aset Lainnya :	**78.670.000**
C	**ASET EKSTRAKOMPTABEL**	**41.767.850**
D	**TOTAL GABUNGAN (A+B+C)**	**15.210.899.201**

Sumber : DKIS Kota Cirebon

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis			95 %	90 %	95 %	100 %		100 %	
2	Penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah Kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi			100 %	90 %	95 %	100 %		100 %	

Sumber : Renstra DKIS 2017 – 2018, Laporan Renja Perubahan 2018

Dari tabel diatas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2017 dapat diukur dengan perhitungan persentase pencaiapan rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

a. *Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik "*, maka digunakan rumus :

$$\%\ Pencapaian\ Rencana\ Tingkat\ Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \text{x} 100\%$$

b. *Semaikin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,* maka digunakan rumus :

$$\%\ Pencapaian\ Rencana = \frac{\text{Re}ncana - (\text{Re}alisasi - \text{Re}ncana)}{\text{Re}ncana} x100\%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- X ≥ 85 % = Baik
- 75 % < X < 85 % = Cukup
- 55 % < X < 75 % = Sedang

X ≤ 55 % = Kurang

Sumber : Renstra DKIS 2017 - 2018

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik * 2017 s.d Oktober 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018 (1 Okotber)	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belanja Tidak Langsung	5.097.740.000	7.498.335.000	4.885.275.464	6.375.795.725	95,83	85,03	**47,09**	**30,51**
- Belanja Pegawai	5.097.740.000	7.498.335.000	4.885.275.464	6.375.795.725	95,83	85,03	47,09	30,51
Belanja Langsung	10.649.998.275	12.067.934.900	10.239.083.678	4.092.586.026	96,14	33,91	**13,31**	**-60,03**
Urusan Komunikasi dan Informatika								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.198.434.700	1.541.647.500	1.048.735.921	868.748.634	87,51	56,35	28,64	-17,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.030.762.000	2.417.480.000	1.975.067.427	722.955.814	97,26	29,91	19,04	-63,40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.945.000	45.825.000	45.565.000	30.575.000	95,04	66,72	-4,42	-32,90

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	108.670.000	0	107.032.500	0	98,49	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	218.184.500	102.962.500	196.439.150	39.280.000	90,03	38,15	-52,81	-80,00
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	248.410.000	212.510.000	245.072.000	143.953.000	98,66	67,74	-14,54	-41,26
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	226.950.000	257.485.000	224.862.500	42.898.900	99,08	16,66	13,45	-80,92
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	974.456.000	725.999.900	939.796.400	430.207.248	96,44	59,26	-25,50	-54,22
Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	103.995.000	154.130.000	94.307.000	43.483.430	90,68	28,21	48,21	-53,89
Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	291.024.000	374.475.000	288.360.000	134.315.000	99,08	35,87	28,67	-53,42

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.139.374.000	1.090.000.000	2.131.541.500	608.300.000	99,63	55,81	-49,05	-71,46
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	2.438.192.000	1.694.860.000	2.323.706.780	480.493.000	95,30	28,35	-30,49	-79,32
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	319.917.075	2.986.024.000	315.196.000	331.554.500	98,52	11,10	833,37	5,19
Urusan Statistik								
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	312.354.000	208.366.000	311.229.000	108.789.000	99,64	52,21	-33,29	-65,05
Urusan Persandian								
Program Persandian Komunikasi dan Informasi	100.000.000	147.500.000	99.205.000	0	99,21	0	47,50	-100,00
Jumlah	**15.747.738.275**	12.067.934.900	**15.124.359.142**	4.092.586.026			**-23,37**	**-72,94**

Keterangan : Untuk Realisasi Anggaran DKIS belum dapat disajikan karena DKIS merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor : 7 Tahun 2016

Sumber : DPA DKIS Tahun Anggaran 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, antara lain :

2.4.1 Tantangan

1. Keterbatasan kewenangan Kota
2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
3. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
4. Masih rendanya komitmen pengelola sumber daya komunikasi, informatika, statistik dan persandian
5. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
6. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
7. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
8. Keterbatasan anggaran;
9. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

2.4.2 Peluang

1. Program Smart City;
2. Adanya Lembaga Pendidikan bidang komunikasi dan informatika;
3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika;
4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika;
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
6. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
7. Komitmen semua unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pada bagian perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Wali kota dan Wakil Wali kota Cirebon, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jawa Barat .

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai 3 (tiga) urusan yang ditangain, yaitu :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Bidang Statistik; dan
3. Urusan Bidang Persandian.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh DKIS Kota Cirebon :

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informasi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.

2. Bidang Statistik

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

3. Bidang Persandian

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi DKIS dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang Cirebon Smart City.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

a. SDM yang banyak belum diimbangi dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan penguasan teknis penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memadai;
b. Belum optimalnya implementasi Pemerintahan berbasis elektronik;
c. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaa informasi publik;
e. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah;
f. Belum optimalnya implementasi satu data pemerintah daerah kota cirebon; dan
g. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKIS yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi DKIS tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKIS yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis

pelayanan DKIS. Isu-isu yang dirumuskan dan yang akan dihadapi DKIS tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kota Cirebon 2018-2023 berdasarkan Perda No 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

"Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah".

Sedangkan Misi nya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang konduksif.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komuniasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah misi ke 2, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Renstra Kemenkominfo, Kominfo Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Cirebon

Hasil analisis terhadap Renstra Kemenkominfo, Kominfo Provinsi dan RPJMD Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKIS Kota Cirebon yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel – tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Permasalahan pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkominfo beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			-	

Tabel III.3
Permasalahan pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KOMINFO Provinsi	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif;	a. SDM yang banyak belum diimbangi dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan		

		penguasan teknis penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memadai; b. Belum optimalnya implementasi Pemerintahan berbasis elektronik; c. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaa informasi publik; e. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah; f. Belum optimalnya implementasi satu data pemerintah daerah kota cirebon;		

		g. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian;		

Tabel. III.4
Permasalahan pelayanan DKIS Kota Cirebon berdasarkan Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran RPJMD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan DKIS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				-
1.	TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG PROFESIONAL, HANDAL DAN TERINTEGRASI DALAM MENUNJANG CIREBON SMARTCITY	- Belum optimalnya implementasi Pemerintah berbasis elektronik - Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; - Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik; - Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah; - Belum optimalnya implementasi satu data pemerintah daerah kota Cirebon; - Belum optimalnya penyelenggaraan persandian	-	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAPEDA

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lagi Disusun

3.5 Penentuan Isi-isu Strategis

Isu strategis yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DKIS Kota Cirebon yaitu:

1. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini menjadi sangat penting, untuk menunjang aktivitas kinerja DKIS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga lebih terarah dan teratur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai DKIS, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya;
2. Belum optimalnya implementasi Pemerintah berbasis elektronik;
3. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
5. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah;
6. Belum optimalnya implementasi satu data pemerintah daerah kota Cirebon;
7. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya implementasi Pemerintah berbasis elektronik	Belum optimalnya tata kelola elektronic Governance dalam rangka penyelenggaraan clean government dan good governance	Masih kurangnya regulasi terkait tata kelola dan implementasi pemerintahan berbasis elektronik
		Belum optimalnya jejaring pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Belum solidnya jejaring internal
			Belum optimalnya jejaring eksternal
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Minimnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dikalangan aparatur
			Minimnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat
		Masih rendahnya budaya birokrasi berbasis elektronik	Masih rendahnya pemahaman paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik
			Masih rendahnya perubahan proses kerja dari manual ke elektronik
		Masih rendahnya pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik	Masih rendahnya pemanfaatan aplikasi
			Masih rendahnya jumlah layanan publikasi berbasis elektronik
		Belum optimalnya pelayanan publik bagi masyarakat	Masih kurangnya percepatan pelayanan kepada masyarakat

2.	Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di Pemerintah Daerah Kota		Masih rendahnya kecepatan internet dan intranet di seluruh Perangkat Daerah
			Belum optimalnya pemanfaatan akses internet/intranet pada Pemerintah Daerah Kota		Masih rendahnya jenis pemanfaatan akses internet/intranet di seluruh Perangkat Daerah
			Masih rendahnya implementasi keamanan informasi		Belum adanya mekanisme dan belum optimalnya perangkat guna mengamankan aset informasi Pemerintah Daerah Kota
					Masih rendahnya kesadaran aparatur akan bahaya isu keamanan informasi
					Masih tingginya insiden keamanan informasi di Pemerintah Daerah Kota
					Belum terintegrasinya urusan Persandian dan Keamanan Informasi
			Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan pusat data yang terintegrasi		Masih rendahnya pemanfaatan Pusat Data (Data Center) yang terintegrasi
					Belum standarnya Pusat Data (Data Center) Pemerintah Daerah
			Masih belum optimalnya Pusat Komando (Command Center) Pemerintah Daerah		Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana Pusat Komando (Command Center) Pemerintah Daerah
			Masih rendahnya fasilitasi pemanfaatan internet bagi masyarakat		Masih sedikitnya jumlah lokasi Hotspot/Akses Internet bagi masyarakat
					Masih rendahnya pengetahuan tentang manfaat internet di masyarakat

3.	Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik		Masih kurangnya jenis informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat
					Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam rangka penyampaian informasi publik
			Masih rendahnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah kota cirebon		Masih rendahnya kualitas informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
					Belum adanya Daftar Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Daerah Kota dan Badan publik lainnya
					Belum optimalnya penyajian daftar informasi publik yang memuat jenis-jenis informasi, yaitu informasi berkala, serta merta dan setiap saat
					Belum optimalnya pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pendokumentasian informasi
			Belum optimalnya layanan pengaduan pada pemerintah daerah kota cirebon		Masih kurangnya intensitas komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan daerah
					Belum optimalnya pemanfaatan kanal pengaduan bagi masyarakat
4.	Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah;		Belum optimalnya penyebarluasan informasi di kota cirebon		Masih rendahnya pemanfaatan kanal informasi dan komunikasi sebagai alat untuk penyebarluasan informasi
					Masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah

					Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya komunikasi public
					Terbatasnya Kanal Informasi pada Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Publik
			Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyebarluasan dan penyampaian informasi		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Komunikasi Publik di Kota Cirebon
					Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya komunikasi public
					Belum optimalnya sinergitas antara elemen Sumber Daya Komunikasi Publik di Kota Cirebon
			Masih rendahnya pemanfaatan media publikasi dalam penyampaian informasi pembangunan		Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemanfaatan media publikasi dalam penyampaian informasi pembangunan
					Belum terintegrasinya pola penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
					Belum optimalnya sinergitas antara Stakeholder dengan Media Massa
5.	Belum optimalnya implementasi satu data pemerintah daerah kota Cirebon;		Belum lengkapnya ketersediaan data		Sumber atau Produsen data belum memiliki mekanisme pengelolaan data
					Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola data dan statistik
			Belum optimalnya pengelolaan data yang tersedia		Pengelolaan data masih manual dan belum terpusat
					Belum adanya standarisasi data dan meta data
					Belum adanya mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi

			Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan Pemerintah		Masih adanya ego sektoral pada perangkat daerah pengampu urusan
					Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan data dan statistik tingkat kota
					Belum optimalnya pengelolaan data dan statistik sektoral
6.	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian		Masih rendahnya pelaksanaan layanan persandian		Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang tata kelola persandian
					Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Persandian
					Masih kurangnya sarana dan prasarana persandian
					Belum terintegrasinya urusan Persandian dan Keamanan Informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (1) menyebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon

Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota Cirebon.

Adapun tujuan DKIS adalah sebagai berikut "**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG PROFESIONAL, HANDAL DAN TERINTEGRASI DALAM MENUNJANG CIREBON SMARTCITY"**

Sasaran

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.
2. Meletakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja pemerintahan.
3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu agar semua organisasi pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya pemerintahan pemerintah berbasis elektronik yang pofesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang smart city		Perangkat daerah yang mengelola teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan (Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi)	4 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah
			Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintah melalui teknologi, informasi dan komunikasi (Target penambahan 1 komunitas per tahun)	22 Komunitas	1 Komunitas	1 Komunitas	1 Komunitas	1 Komunitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan layanan pemerintahan berbasis TIK	Persentase pemanfaatan TIK terhadap layanan Pemerintahan (Jumlah layanan pemerintahan berbasis TIK di bagi jumlah layanan pemerintahan secara keseluruhan X 100%)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur TIK	Prersentase Kualitas layanan Infrastruktur TIK (Banyak OPD yang terlayanani)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Meningkatnya kualitas layanan informasi pubik dan pengaduan	Presentase kualitas informasi publik dan pengaduan yang terselesaikan (Banyaknya Aduan yang masuk dengan yang terselesaikan)	82,5 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5%
		Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Banyaknya tayangan dimedia cetak dan elektronik di bagi 75 tayangan)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan data	Jumlah sistem aplikasi yang diintegrasikan	2	2	2	2	2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		sektoral kepada *stakeholder* berbasis teknologi Informasi dan komunikasi						
			Persentase data yang terisi di dalam Cirebon Satu Data (Jumlah data yang terisi dibagi jumlah data yang ada)	70,25 %	72,75 %	75, 25 %	77,75 %	80,25 %
		Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi	Persentase layanan dan sarana prasarana persandian dan keamanan informasi	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	76 %	78 %	79 %	80 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DKIS. Strategi dan kebijakan dalam Renstra DKIS selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DKIS bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DKIS. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dapat disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.1. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : SEHATI kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif)			
MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGIS**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya pemerintahan pemerintah berbasis elektronik yang pofesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang smartcity			
	Meningkatkan layanan pemerintahan berbasis TIK	Meningkatkan kualitas penerapan pelayanan berbarbasis TIK	Melaksanakan penyelenggaraan pendukung penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Cirebon
	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur TIK	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana infratruktur TIK	Melaksanakan penyelenggaraan TIK
	Meningkatnya kualitas layanan informasi pubik dan pengaduan	Peningkatan kualitas layanan informasi publik dan pengaduan	Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pengaduan publik yang terintegrasi
	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	Melakukan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat;
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan data sektoral kepada *stakeholder* berbasis teknologi Informasi dan komunikasi	Mewujudkan pelayanan data statistik sektoral yang berkualitas berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan data statistik sektoral kepada *stakeholder* berbasis teknologi, informasi dan komunikasi

	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi	Mewujudkan tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE	Melaksanakan peningkatan layanan persandian dan keamanan informasi
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat	Melaksanakan survey indeks kepausan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam suatu program dan kegiatan adalah pencapaian indikator kinerja yang ditentukan, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel VI.1 berikut ini:

TABEL VI.1

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG PROFESIONAL, HANDAL DAN TERINTEGRASI DALAM MENUNJANG CIREBON SMARTCITY				Perangkat daerah yang mengelola Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan	1 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah		7 Perangkat Daerah		9 Perangkat Daerah		32 Perangkat Daerah		DKIS	
				Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi pemerintah melalui teknologi, informasi dan komunikasi	1 Komunikas	22 Komunitas		1 Komunitas		1 Komunitas		1 Komunitas		1 Komunitas		27 Komunitas		DKIS	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis TIK			**Presentase pemanfaatan TIK terhadap layanan Pemerintahan**	**70 %**	**75 %**		**80 %**		**85 %**		**90 %**		**95 %**		**95 %**			
		2 10 01 20	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	**Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo**	**70 %**	**75 %**	**390.000.000**	**80 %**	**430.000.000**	**85 %**	**477.500.000**	**90 %**	**517.750.000**	**95 %**	**566.025.000**	**95 %**	**2.381.275.000**		
		2 10 01 20 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Sertifikasi Aparatur dan Diklat Masyarakat bidang TIK	- Orang	8 tersetifikasi ; 400 Orang	140.000.000	10 ASN ; 450 Orang	155.000.000	12 ASN ; 500 Orang	175.000.000	14 ASN ; 550 Orang	185.000.000	16 ASN ; 600 Orang	200.000.000	16 ASN ; 600 Orang	855.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 20 02	Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika	Terselenggara nya Bimtek bidang TIK untuk Aparatur	Aparatur 108 orang ; Masyarakat 44 orang	1 Bimtek	250.000.000	2 Bimtek	275.000.000	2 Bimtek	302.500.000	2 Bimtek	332.750.000	2 Bimtek	366.025.000	9 Bimtek	1.526.275.000		
		2 10 01 23	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman standar dan pelaksanaan penerapan e-Government**	**1 Kebijakan**	**1 Kebijakan**	**50.000.000**	**1 Kebijakan**	**50.000.000**	**1 Kebijakan**	**75.000.000**	**1 Kebijakan**	**75.000.000**	**1 Kebijakan**	**75.000.000**	**5 Kebijakan (6 Kebijakan terhitung dengan data awal)**	**325.000.000**		
		2 10 01 23 01	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Informatika dan Komunikasi	Tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman guna pengaturan mekanisme Sistem berbasis TIK	1 Kebijakan	1 Kebijakan	50.000.000	1 Kebijakan	50.000.000	1 Kebijakan	75.000.000	1 Kebijakan	75.000.000	1 Kebijakan	75.000.000	5 Kebijakan (6 Kebijakan terhitung dengan data awal)	325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi**	**Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur**	**70 %**	**75 %**	**1.400.000.000**	**80 %**	**1.615.500.000**	**85 %**	**1.832.050.000**	**90 %**	**2.055.255.000**	**95 %**	**2.335.780.500**	**95 %**	**9.238.585.500**		
		2 10 01 24 01	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya penerapan sistem informasi	16 Sistem Aplikasi	4 Sistem Aplikasi	225.000.000	4 Sistem Aplikasi	300.000.000	4 Sistem Aplikasi	350.000.000	4 Sistem Aplikasi	400.000.000	4 Sistem Aplikasi	450.000.000	36 Sistem Aplikasi	1.725.000.000		
		2 10 01 24 02	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Terpeliharanya pengelolaan sistem Informasi Manajemen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	6 Dokumen	635.000.000		
		2 10 01 24 03	Pengadaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikas	tersedianya aplikasi dan database media elektronik, cetak dan radio komunitas	-	-	0	-	-	0									

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 24 04	Penyediaan Layanan Integrasi sistem informasi e-Government	Tersedianya informasi mengenai data yang dapat digunakan secara bersama oleh sistem-sistem informasi	2 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	7 Dokumen	660.000.000		
		2 10 01 24 05	Penyediaan layanan sistem informasi Smart City	Terselenggaranya layanan sistem informasi Smart City	1 Layanan	3 Layanan	605.000.000	3 Layanan	665.500.000	3 Layanan	732.050.000	3 Layanan	805.255.000	3 Layanan	885.780.500	3 Layanan	3.693.585.500		
		2 10 01 24 06	Penyediaan layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	Terselenggaranya layanan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	1 Layanan	1 Layanan/ Lokasi	400.000.000	1 Layanan/ Lokasi	450.000.000	1 Layanan/ Lokasi	500.000.000	1 Layanan/ Lokasi	550.000.000	1 Layanan/ Lokasi	625.000.000	2 Layanan / 2 Lokasi	2.525.000.000		
	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur TIK			**Presentase Kualitas layanan Infrastruktur TIK**	**70 %**	**75 %**		**80 %**		**85 %**		**90 %**		**95 %**		**95 %**			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 19	**Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi**	**terwujudnya kerjasama bidang kominfo**	**70 %**	**75 %**	**215.000.000**	**80 %**	**450.000.000**	**85 %**	**300.000.000**	**90 %**	**350.000.000**	**95 %**	**400.000.000**	**95 %**	**1.715.000.000**		
		2 10 01 19 01	Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	Terselenggaranya Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	1 Dokumen Kerjasama	2 Dokumen Kerjasama	80.000.000	2 Dokumen Kerjasama	100.000.000	2 Dokumen Kerjasama	125.000.000	2 Dokumen Kerjasama	150.000.000	2 Dokumen Kerjasama	175.000.000	11 Dokumen Kerjasama	630.000.000		
		2 10 01 19 02	Penyelenggaraan Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terselengganya Layanan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	1 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	135.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	135.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 19 02	Layanan Keamanan Informasi	Terselenggaranya layanan keamanan informasi	-	-	0	2 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall;	350.000.000	2 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall;	175.000.000	2 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall;	200.000.000	2 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall;	225.000.000	8 Dokumen ; 1 Lisensi Firewall	950.000.000		
		2 10 01 22	**Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi**	**Terpenuhinya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan**	**70 %**	**75 %**	**1.315.000.000**	**80 %**	**2.525.000.000**	**85 %**	**2.825.000.000**	**90 %**	**3.025.000.000**	**95 %**	**3.300.000.000**	**95 %**	**12.990.000.000**		
		2 10 01 22 01	Pemeliharaan Wireless	Terpenuhinya Jaringan Intranet Pemkot Cirebon yang handal	20 Titik ; 2 Backbone	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	150.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	150.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	175.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	175.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	200.000.000	52 SKPD ; 5 Dokumen Laporan Akhir Tahun	850.000.000		
		2 10 01 22 02	Pemeliharaan Tower	Tersedianya Tower penunjang jaringan intranet yang selalu baik dan handal	21 Tower	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	100.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	125.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	125.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	150.000.000	52 SKPD ; 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	175.000.000	52 SKPD ; 5 Dokumen Laporan Akhir Tahun	675.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 2 2 03	Pemeliharaan Server	Terpenuhinya kinerja server-server aplikasi dan sistem informasi yang baik pada Pemkot Cirebon	7 Server	7 Server	50.000.000	7 Server	75.000.000	7 Server	100.000.000	7 Server	125.000.000	7 Server	150.000.000	7 Server	500.000.000		
		2 10 01 2 2 04	Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung	Tersedianya Bandwidth Internet yang memadai	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	850.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.000.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.150.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.250.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	1.350.000.000	50 Mbps Internasional; 100 Mbps Lokal; Up to 500 Mbps Broadband	5.600.000.000		
		2 10 01 2 2 05	Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon	Tersedianya kesesuaian infrastruktur sesuai dengan kebutuhan aplikasi maupun kebijakan	2 Lokasi	0	-	1 Lokasi	250.000.000	1 Lokasi	300.000.000	1 Lokasi	300.000.000	1 Lokasi	350.000.000	6 Lokasi	1.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 22 06	Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi	terwujudnya peningkatan kapasitas saranan dan prasarana dan Tersedianya Akses Point yang dekat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	2 Server	5 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK	165.000.000	5 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK	175.000.000	5 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK	200.000.000	5 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK	225.000.000	5 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK	250.000.000	25 Perangkat Hardware dan Jaringan TIK; 2 Server	1.015.000.000		
		2 10 01 22 07	Pengadaan Data Center	Tersedianya Ruangan dan Perangkat Pusat Data yang sesuai standar		-	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	0		
		2 10 01 22 08	Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Center	Terpenuhinya Pusat data dan Pusat Kendali yang berfungsi baik dan optimal		-	0	2 Lokasi	250.000.000	2 Lokasi	275.000.000	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	325.000.000	2 Lokasi	1.150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 22 09	Pengadaan data recovery center	Tersedianya data recovery center (DRC) sebagai back up online sistem dan data - data digital				1 Lokasi	500.000.000	1 Lokasi	500.000.000	1 Lokasi	500.000.000	1 Lokasi	500.000.000	1 Lokasi	2.000.000.000		
	Meningkatnya kualitas layanan informasi pubik dan pengaduan			**Prosentase Jumlah informasi publik dan pengaduan yang terselesaikan**	**80 %**	**82,5 %**		**85 %**		**87,5 %**		**90 %**		**92,5 %**		**92,5 %**			
		2 10 01 16	**Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**	**terwujudnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang efektif efisien dan murah**	**70 %**	**75 %**	**165.000.000**	**80 %**	**200.000.000**	**85 %**	**215.000.000**	**90 %**	**260.000.000**	**95 %**	**260.000.000**	**95 %**	**1.100.000.000**		
		2 10 01 16 01	Pelayanan Informasi Publik	Terlayaninya permintaan informasi publik	4 Laporan ; 1 Rakor PPID	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	130.000.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	150.000.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	150.000.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	175.000.000	4 Laporan ; 4 Rakor PPID; 2 Layanan	175.000.000	24 Laporan ; 24 Rakor PPID; 2 Layanan	780.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 16 02	Pembangunan Sistem Informasi Publik	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 10 01 16 03	Pemeliharaan Sistem Informasi Publik	Terpeliharanya Sistem Pelayanan Informasi Publik		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
		2 10 01 16 04	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Tersedianya Data dan Informasi Publik		1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	5 Dokumen	320.000.000		
		2 10 01 17	**Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik**	**tersampaikannya informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat**	**60 %**	**65 %**	**605.000.000**	**70 %**	**1.195.000.000**	**75 %**	**720.000.000**	**80 %**	**745.000.000**	**85 %**	**795.000.000**	**85 %**	**4.060.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 17 01	Monitoring Isu Publik di media (analisis media)	Tersedianya analisi berita / isu	-	-	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
		2 10 01 17 02	Pengumpulan Pedapat Umum	Tersedianya hasil rekam pendapat umum		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	250.000.000		
		2 10 01 17 03	Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sistem pengaduan masyarakat		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
		2 10 01 17 04	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Terlayaninya pengaduan masyarakat	-	5 Laporan	410.000.000	5 Laporan	450.000.000	5 Laporan	475.000.000	5 Laporan	500.000.000	5 Laporan	550.000.000	25 Laporan	2.385.000.000		
		2 10 01 17 05	Penyediaan Bahan Komunikasi bagi Pimpinan Daerah	tersedianya press release bagi pimpinan daerah dan publik	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	72 Dokumen	150.000.000		
		2 10 01 17 06	Penguatan Hubungan dengan Media	terlaksananya penguatan hubungan dengan media	1 Kegiatan	1 Kegiatan	115.000.000	1 Kegiatan	115.000.000	1 Kegiatan	115.000.000	1 Kegiatan	115.000.000	1 Kegiatan	115.000.000	6 Kegiatan	575.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 17 07	Pembangunan Media Center	Tersedianya media center		-	0	1 Lokasi	500.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Lokasi	500.000.000		
	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			**Presentase Kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan**	**70 %**	**75 %**		**80 %**		**85 %**		**90 %**		**95 %**		**95 %**	-		
		2 10 01 18	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Tersedianya media komunikasi**	**70 %**	**75 %**	**760.000.000**	**80 %**	**925.000.000**	**85 %**	**930.000.000**	**90 %**	**1.030.000.000**	**95 %**	**1.035.000.000**	**95 %**	**4.680.000.000**		
		2 10 01 18 01	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi Kota Cirebon		-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 18 02	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	cakupan pengembangan dan pemberdaayaan KIM / Komunitas di Kota Cirebon	22 Kelompok Informasi Masyarakat	22 Kelompok Informasi Masyarakat	60.000.000	1 Komunitas	75.000.000	1 Komunitas	80.000.000	1 Komunitas	80.000.000	1 Komunitas	85.000.000	27 Komunitas	380.000.000		
		2 10 01 18 03	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi		-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0		
		2 10 01 18 04	Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersampaikannya informasi kepada masyarakat melalui media cetak (buletin , majalah, dsb)	2 Edisi	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	200.000.000	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	250.000.000	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	250.000.000	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	300.000.000	2 Gerai ; 3 Warta Balaikota	300.000.000	12 Gerai ; 18 Warta Balaikota	1.300.000.000		
		2 10 01 18 05	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Pengadaanbarang dan jasa secara elektronik	12 Bulan												-		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 18 06	Pengelolaan Pelayanan Komisi Informasi Kota Cirebon	Tersedianya informasi terhadap pelayanan mediasi dan ajudikasi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	3.000.000.000		
		2 10 01 21	**Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**	**terwujudnya penyebarluasan informasi pembangu nan dan pemerinta han kepada masyarakat**	**70 %**	**75 %**	**1.285.000.000**	**80 %**	**1.410.000.000**	**85 %**	**1.490.000.000**	**90 %**	**1.565.000.000**	**95 %**	**1.620.000.000**	**95 %**	**7.370.000.000**		
		2 10 01 21 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersampaikannya informasi pembangunan daerah melalui website (online)	12 Bulan	12 Bulan	270.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	325.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	1.595.000.000		
		2 10 01 21 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersampaikannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	12 Bulan	12 Bulan / 75 Tayang	1.015.000.000	12 Bulan / 75 Tayang	1.050.000.000	12 Bulan / 75 Tayang	1.100.000.000	12 Bulan / 75 Tayang	1.150.000.000	12 Bulan / 75 Tayang	1.200.000.000	12 Bulan / 375 Tayang	5.515.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 2 1 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tersampaikannya informasi penyuluhan melalui media tradisional		-	0	1 Kali	30.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	40.000.000	4 Kali	140.000.000		
		2 10 01 2 1 04	Penyediaan Sarana multimedia	Tersedianya sarana dan prasarana Multimedia		-	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	4 Paket	120.000.000		
		2 10 01 2 1 05	Sosialisasi / penyuluhan internet sehat dan aman (INSAN)	Tersampaikannya informasi mengenai internet sehat dan aman (INSAN) kepada masyarakat	2 Kegiatan (cetak 10.000 Brosur dan 1.000 Poster	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Kegiatan (cetak 10.000 Brosur dan 1.000 Poster	0		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan data sektoral kepada stakeholder berbasis TIK			**Jumlah sistem aplikasi yang diintegrasikan**		**2 Aplikasi**		**2 Aplikasi**		**2 Aplikasi**		**2 Aplikasi**		**2 Aplikasi**		**10 Aplikasi**			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Prosentase data yang terisi di dalam Cirebon Satu Data	-	**70,25 %**		**72,75 %**		**75,25 %**		**77,75 %**		**80,25 %**		**80,25 %**			
		2 14 01 15	**Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah**	**Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan**	**5 Dokumen**	**60 %**	**295.000.000**	**75 %**	**345.000.000**	**80 %**	**370.000.000**	**85 %**	**425.000.000**	**90 %**	**450.000.000**	**90 %**	**1.885.000.000**		
		2 14 01 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data PDRB Kota Cirebon	1 Dokumen	0		0		0		0		0		1 Dokumen	0		
		2 14 01 15 02	Penyusunan IPM	Tersedianya data IPM Kota Cirebon	1 Dokumen	0		0		0		0		0		1 Dokumen	0		
		2 14 01 15 03	Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya Data Profil Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	6 Dokumen	435.000.000		
		2 14 01 15 04	Penyusunan Indikator Makro Daerah	Tersedianya Data Indikator Makro Daerah Kota Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	6 Dokumen	435.000.000		
		2 14 01 15 05	Analisis data statistik	Tersedianya hasil analisis data statistik kota cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	6 Dokumen	390.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Cirebon Satu Data	Jumlah data yang terisi pada Aplikasi Cirebon Satu Data	-	70,25 %	75.000.000	72,75 %	100.000.000	75,25 %	125.000.000	77,75 %	150.000.000	80,25 %	175.000.000	80,25 %	625.000.000		
	Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi			**Presentase layanan dan sarana prasarana persandian dan keamanan informasi**	**50 %**	**55 %**		**60 %**		**65 %**		**70 %**		**75 %**		**75 %**			
		2 15 01 15	**Program Persandian Komunikasi dan Informasi**	**terwujudnya pelayanan persandian komunikasi dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat kota cirebon**	**50 %**	**55 %**	**70.000.000**	**60 %**	**130.000.000**	**65 %**	**110.000.000**	**70 %**	**140.000.000**	**75 %**	**145.000.000**	**75 %**	**595.000.000**		
		2 15 01 15 02	Pengadaan Peralatan Persandian	Terfasilitasinya peralatan persandian untuk menunjang pelayanan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Telepon PABX dan 4 Buah HT	1 Unit Antene Repeter	40.000.000	Pesawat Rig 2 Set	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	6 Paket	290.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 15 01 15 03	Pemeliharaan Pengelolaan Peralatan Persandian	Tersedianya anggaran pemeliharaan peralatan persandian		-	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	4 Paket	120.000.000		
		2 15 01 15 04	Sosialisasi Persandian	Terselenggaranya sosialisasi kewaspadaan keamanan informasi terhadap aparatur dan masyarakat kota cirebon; Sertifikasi Elektronik		52 Orang	30.000.000	52 Orang; 2 Orang	50.000.000	52 Orang; 2 Orang	30.000.000	52 Orang; 2 Orang	35.000.000	52 Orang; 2 Orang	40.000.000	52 Orang; 8 Orang	185.000.000		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**75 %**		**76 %**		**78 %**		**79 %**		**80 %**		**80 %**			
		2 10 01 1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya tertib administrasi perkantoran**	**80 %**	**85 %**	**1.765.000.000**	**87 %**	**2.070.000.000**	**90 %**	**2.172.500.000**	**95 %**	**2.285.000.000**	**100 %**	**2.392.500.000**	**100 %**	**10.685.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas/Tenaga kebersihan kantor, pramu kantor/ ruangan dan pramu taman	5 Orang	5 Orang	160.000.000	6 Orang	210.000.000	6 Orang	225.000.000	6 Orang	240.000.000	6 Orang	260.000.000	6 Orang	1.095.000.000		
				Petugas angkut Jasa kebersihan				2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang			
				Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor	5 Stell	5 Stell		6 Stell		6 Stell		6 Stell		6 Stell		6 Stell			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis			
				Gedung tempat kerja yang dibersihkan	2 Gedung	2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung			
		2 10 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Harian Lokal	4 Judul	4 Judul	25.000.000	4 Judul	30.000.000	4 Judul	30.000.000	4 Judul	35.000.000	4 Judul	35.000.000	4 Judul	155.000.000		
				Surat Kabar Harian Regional/Provinsi	1 Judul	1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul			
				Surat Kabar Harian Nasional	1 Judul	1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul		1 Judul			
				Buku / Peraturan Perundang-undangan	-	-		12 Buku		12 Buku		12 Buku		12 Buku		48 Buku			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 1 0 1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan/Notulensi rapat internal/briefing	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	190.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	880.000.000		
				Laporan mamin harian pegawai	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			
				Laporan penerimaan/ kunjungan tamu	12 Laporan	10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan			
				Laporan mamin insidentil hari besar	5 Laporan	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan			
		2 10 0 1 1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	725.000.000	12 Laporan	725.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	3.450.000.000		
		2 10 0 1 1 2 0	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	6 Orang	8 Orang	245.000.000	8 Orang	300.000.000	8 Orang	300.000.000	8 Orang	300.000.000	8 Orang	300.000.000	8 Orang	1.445.000.000		
				Seragam petugas/tenaga pengamanan kantor	6 Stell	8 Stell		8 Stell		8 Stell		8 Stell		8 Stell		8 Stell			
				Gedung tempat kerja yang dijaga	2 Gedung	2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 01 21	Penataan dokumen arsip kantor/dinas/ badan/sekretariat	Laporan penataan dokumen arsip		1 Kali	10.000.000	1 Kali	12.500.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	17.500.000	1 Kali	20.000.000	5 Kali	75.000.000		
		2 10 01 01 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	ATK	50 Jenis	50 Jenis	275.000.000	50 Jenis	300.000.000	50 Jenis	300.000.000	50 Jenis	350.000.000	50 Jenis	350.000.000	50 Jenis	1.575.000.000		
				Barang Cetakan	10 Cetakan	12 Cetakan		12 Cetakan		12 Cetakan		12 Cetakan		12 Cetakan		12 Cetakan			
				Penggandaan	70.000 Lembar	75.000 Lembar		75.000 Lembar		75.000 Lembar		75.000 Lembar		75.000 Lembar		375.000 Lembar			
		2 09 01 01 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	3 Struk	3 Struk	305.000.000	3 Struk	350.000.000	3 Struk	350.000.000	3 Struk	375.000.000	3 Struk	375.000.000	3 Struk	1.755.000.000		
				Struk Pembayaran Tagihan Rekening telepon	2 Struk	2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk			
				Struk Pembayaran Tagihan Rekening air (PDAM)	2 Struk	2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk		2 Struk			
				Struk Pembayaran Tagihan Rekening TV Satelit				1 Struk		1 Struk		1 Struk		1 Struk		1 Struk			
				Isi ulang tabung Elpiji 12 kg	24 Kali	24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Gedung tempat kerja	2 Gedung	2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung		2 Gedung			
		2 10 01 01 26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	SKPD-PKB, KIR, dan premi asuransi kendaraan dinas/operasional jabatan:			45.000.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		52.500.000		255.000.000		
				- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4	4 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit			
				- STNK/SKPD PKB R2	14 Unit	14 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit		19 Unit			
				- STNK Pick Up		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				- KIR Pick Up		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				- Polis asuransi kendaraan R4	-	2 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
				- Polis asuransi kendaraan R2	-	9 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Komunikasi, Informatikan dan Statistik Kota Cirebon**	**70 %**	**75 %**	**8.025.000.000**	**80 %**	**1.250.000.000**	**85 %**	**920.000.000**	**90 %**	**825.000.000**	**95 %**	**825.000.000**	**95 %**	**11.845.000.000**		
		2 10 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung DKIS		1 Gedung	7.000.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Gedung	7.000.000.000		
		2 10 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung DKIS	2 Gedung	2 Gedung	120.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	50.000.000	2 Gedung	320.000.000		
		2 10 01 02 42	Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	90.000.000	2 Gedung	100.000.000	2 Gedung	100.000.000	2 Gedung	100.000.000	2 Gedung	100.000.000	2 Gedung	490.000.000		
		2 10 01 02 49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/ Jabatan	Kendaraan dinas/ operasional/jabatan:			155.000.000		350.000.000		20.000.000	-	0	-	0		525.000.000		
				-R-2	9 Unit	9 Unit				1 Unit						19 Unit			
				-R-4	1 Unit			1 Unit								2 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 02 51	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	7 Jenis	290.000.000	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	300.000.000	7 Jenis	200.000.000	7 Jenis	200.000.000	7 Jenis	1.290.000.000		
		2 10 01 02 53	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional/jabatan	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional :			295.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.695.000.000		
				Servis :															
				- Kendaraan R-4	3 Unit	5 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
				- Kendaraan R-2	5 Unit	15 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit			
				- Kendaraan Pik Up	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				Suku Cadang :															
				- Kendaraan R-4	3 Unit	5 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
				- Kendaraan R-2	5 Unit	15 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit			
				- Kendaraan Pik Up	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				BBM :															
				- Kendaraan R-4	3 Unit	5 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
				- Kendaraan R-2	5 Unit	15 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit			
				- Kendaraan Pik Up	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				- Genset		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				Pelumas :															
				- Kendaraan R-4	3 Unit	5 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit		7 Unit			
				- Kendaraan R-2	5 Unit	15 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				- Kendaraan Pik Up	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
		2 10 01 02 55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	525.000.000		
		2 10 01 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat Kehadiran Pegawai**	**100%**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**350.000.000**		
		2 10 01 03 07	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	Terpenuhinya pakaian dinas untuk pegawai			50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		350.000.000		
				Pakaian Dinas Harian	50 Stell	53 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell			
				Pakaian Dinas Lapangan				-		-		55 Stell		55 Stell		55 Stell			
				Pakaian Dinas Hari Tertentu (Korpri, Batik)				55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell			
				Pakaian Olah Raga	50 Stell	53 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell		55 Stell			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 10 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya capaian kinerja dan keuangan Diskominfo dan Statistik	100 %	100 %	95.900.000	100 %	120.700.000	100 %	123.200.000	100 %	140.700.000	100 %	140.700.000	100 %	621.200.000		
		2 10 01 06 01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan SKPD, terdiri dari :	7 Dokumen	9 Dokumen	28.500.000	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	40.000.000	10 Dokumen	40.000.000	49 Dokumen	178.500.000		
				Laporan triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		20 Dokumen			
				Laporan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Dokumen LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Laporan evaluasi kinerja bulanan				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Laporan PK		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Laporan RKT		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Inventaris Barang	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		2 10 01 6 08	Penyusunan RKA, DPA SKPD dan perubahannya	Tersedianya Dokumen RKA, DPA dan perubahannya, terdiri dari :	4 Dokumen	4 Dokumen	25.700.000	4 Dokumen	25.700.000	4 Dokumen	25.700.000	4 Dokumen	25.700.000	4 Dokumen	25.700.000	20 Dokumen	128.500.000		
				Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Dokumen RKAP	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Dokumen DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		2 10 01 06 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersusunnya profil SKPD		-	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	52.500.000		
				Buku Profil				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Website				1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			
		2 10 01 06 15	Penyusunan Pelaporan keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD, terdiri dari :	2 Dokumen	2 Dokumen	11.700.000	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	66.700.000		
				Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		2 10 01 06 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD, terdiri dari :	2 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	30.000.000	14 Dokumen	130.000.000		
				Dokumen RENSTRA		1 Dokumen		-		-		-	-	1 Dokumen		2 Dokumen			
				Dokumen Perubahan RENSTRA		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen				2 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		UKER PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				Dokumen RENJA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		2 10 01 06 17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Pedoman kinerja, terdiri dari :	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	65.000.000		
				Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Peta Proses Bisnis															
		2 10 01 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Hasil Penilaian Kinerja ASN pada Survey Kepuasan Pelanggan**	-	**65%**	**-**	**70%**	**170.000.000**	**75%**	**200.000.000**	**80%**	**205.000.000**	**95%**	**235.000.000**	**95%**	**810.000.000**		
		2 10 01 05 13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Terselenggaraya kegiatan ceramah dan pengajian pegawai		**4 Kali**	**-**	**12 Kali**	**20.000.000**	**12 Kali**	**25.000.000**	**12 Kali**	**30.000.000**	**12 Kali**	**35.000.000**	**48 Kali**	**110.000.000**		
		2 10 01 05 19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan sinergitas	-	1 Laporan		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	200.000.000	4 Laporan	700.000.000		
							16.485.900.000		**12.961.200.000**		**12.835.250.000**		**13.718.705.000**		**14.650.005.500**		**70.651.060.500**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

Setelah diuraikan Rencana Program dan Kegiatan maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon menyusun Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, yang meliputi indikator kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selengkapnya dapat dijabarkan pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase pemanfaatan TIK terhadap layanan Pemerintahan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2.	Presentase Kualitas layanan Infrastruktur TIK	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
3.	Presentase Jumlah informasi publik dan pengaduan yang terselesaikan	80 %	82,5 %	85 %	87,5 %	90 %	92,5%	92,5%
4.	Presentase kualitas penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
5.	Jumlah sistem aplikasi yang diintegrasikan	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	10 Aplikasi
6.	Presentase data yang terisi di dalam Cirebon Satu Data	-	70,25 %	72,75 %	75, 25 %	77,75 %	80,25 %	80,25 %
7.	Presentase Jumlah layanan dan sarana prasarana persandian, dan keamanan informasi	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %
8.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	75 %	76 %	78 %	79 %	80 %	80 %

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Renstra tersebut diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakannya. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023;
2) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2018 - 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon serta dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Ka Sub Bagian serta Ka Sub Bidang;
3) Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2018 - 2023, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja/kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
4) Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon tahun 2018 - 2023 yang tercermin dari Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan

menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan hasil kinerja DKIS, seluruh unsur pendukung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon akan memberikan pelayanan prima sesuai tugas pokok dan fungsinya. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasi kegiatan setiap tahun diharapkan akan semakin meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu "**Terwujudnya pemerintahan pemerintah berbasis elektronik yang pofesional, handal dan terintegrasi dalam menunjang smartcity**".

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi niat kita bersama. Aamiin.